

SKRIPSI
PEMENUHAN HAK KESEHATAN WARGA NEGARA DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA STUDI TERHADAP
PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Oleh :

ANITIYA GUSANDA SARI

1810112224

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing

Didi Nazmi, S.H.,M.H.,
Beni KharismaArrasuli, S.H.I., LL.M.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2022

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan generasi hak asasi manusia kedua yang memiliki esensi bahwa negara melalui pemerintah wajib turut serta dalam pengembangan hak sosial berupa pemenuhan atas hak kesehatan masyarakat (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Namun demikian, diskusi mengenai hak kesehatan memerlukan definisi yang jelas terlebih dahulu tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak kesehatan. Apakah hak kesehatan berarti setiap orang berhak untuk sehat dan siapa yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut dan, haruskah pemerintah turut bertanggung jawab terhadap status kesehatan masyarakatnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1.) Bagaimana Pengaturan Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Negara di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19? 2.) Apakah Vaksinasi Covid-19 Merupakan Bentuk dari Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Negara? Serta tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemenuhan hak kesehatan warga Negara Untuk mengetahui apakah vaksinasi Covid-19 merupakan bentuk dari pemenuhan hak kesehatan bagi warga Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) yaitu diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan lain-lain. Hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu pengaturan pemenuhan hak kesehatan telah dijamin didalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan vaksinasi merupakan bentuk dari pemenuhan hak kesehatan bagi warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya.

